

ABSTRAK

Di Indonesia, pengelolaan sampah adalah subjek yang sedang diperdebatkan. Polusi disebabkan oleh melonjaknya jumlah sampah yang tidak diimbangi oleh pengelolaan sampah. Problem pengelolaan sampah menjadi sangat penting di banyak tempat, termasuk di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penegakan hukum lingkungan dan sanksi yang kurang efektif untuk melakukan efek jera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dan mengapa penyidik pegawai negeri sipil di Kabupaten Jember tidak melaksanakan penegakan peraturan tersebut. Penelitian yuridis sosiologis menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Hasilnya menunjukkan bahwa Perda No. 2 tahun 2023 tidak efektif dalam pengelolaan sampah. Kinerja yang buruk Satpol PP sebagai lembaga penegak hukum adalah penyebabnya. Sampah umumnya dianggap oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami proses pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bekerja sama dengan penyidik pegawai negeri sipil karena tidak memiliki penyidik sendiri.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Pengelolaan sampah.

ABSTRACT

Waste management is a hotly debated issue in Indonesia. Pollution is caused by the increasing amount of waste, which is not being managed properly. The issue of waste management has become very important in many places, including Jember Regency. One of them is the authority of the civil servant investigators to carry out environmental law enforcement and sanctions, which are less effective to have a deterrent effect. The purpose of this research is to find out how effective the Regional Regulation Number 2 Year 2023 on Waste Management is on waste management in Jember Regency and why the civil servant investigators in Jember Regency fail to enforce the regulation. Socio-legal research uses legal and conceptual methods. Data sources were obtained directly through interviews with sources and respondents. The results show that Perda No. 2 of 2023 is not effective in waste management. This is due to the poor performance of Satpol PP as a law enforcement agency. Waste is generally considered to be the responsibility of the government. This shows that the community does not understand the waste management process. In addition, the Jember Regency Environmental Agency works with civil servant investigators because it does not have its own investigators.

Keywords: Effectiveness, Regional Regulations, Waste Management